

Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan sekaligus Meminimalisir Moral Hazard Pengelola Keuangan Negara Melalui Implementasi Kartu Kredit Pemerintah

Farida Wijayanti

Universitas Islam Kadiri (UNISKA)

email: f4ridh.aw@gmail.com

Abstract

Corporate Credit Card is carried out in order to support cashless society, modernization and applying the principles of accountability and transparency of state finance management. The purpose of Corporate Credit Card regulation are reducing cash transaction, reducing idle cash and cost of government fund and reducing cash and non cash transaction fraud. This research was aimed how the implementation of Corporate Credit Card increase effectiveness and efficiency of state finance management and decrease moral hazard behavior at Satuan Kerja KPPN Blitar as object. This Research used qualitative case study approach study with interview result as primary data and observation and document as secondary data. Informers was chosen by purposive sampling. The results of the research conducted, obtained an ability of Corporate Credit Card implemetasion to increase effectiveness dan efficiency of state finance management and decrease moral hazard behavior graduated on 2018, it was still found a lot of mistakes in the writing (tenses). This research was aimed at identifying the use of tenses in sentences applied in the English abstract of Medical Record students in STIKes Mitra Husada Karanganyar. The type of this research was descriptive through documentation study approach.

The population was all English abstracts of scienti c writing of Medical Record students graduaten in 2018 which was 120. The sampling was purposive sampling. The data were analyzed descriptively. The results of the research showed that the inappropriate use of tense was more than that of the appropriate one in the part of background; the inappropriate use of tense was more than that of the appropriate one in the part of research method; the inappropriate use of tense was more than that of the appropriate one in the part of result (findings); the appropriate use of tense was more than that of the inappropriate one in the part of discussion; and the appropriate use of tense was more than that of the inappropriate one in the part of conclusion and suggestion. Keywords: abstract, appropriate, inappropriate, tense, us. Based on the preliminary survey that had been done toward ten English abstracts of Medical Record students graduated on 2018, it was still found a lot of mistakes in the writing (tenses). This research was aimed at identifying the use of tenses in sentences applied in the English abstract of Medical Record students in STIKes Mitra Husada Karanganyar. The type of this research was descriptive through documentation study approach.

The population was all English abstracts of scienti c writing of Medical Record students graduaten in 2018 which was 120. The sampling was purposive sampling. The data were analyzed descriptively. The results of the research showed that the inappropriate use of tense was more than that of the appropriate one in the part of background; the inappropriate use of tense was more than that of the appropriate one in the part of research method; the inappropriate use of tense was more than that of the appropriate one in the part of result (findings); the appropriate use of tense was more than that of the inappropriate one in the part of discussion; and the appropriate use of tense was more than that of the inappropriate one in the part of conclusion and suggestion. Keywords: abstract, appropriate, inappropriate, tense, us

Keywords: *Corporate Credit Card, Government, Effeiciency, Effectiveness, Moral Hazard.*

Latar Belakang Teoritis

Sistem pembayaran memegang peranan penting dalam perekonomian seiring dengan semakin meningkatnya volume dan nilai transaksi, serta sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi. Beberapa negara telah menggalakkan *cashless society* atau masyarakat tanpa uang tunai. Instrument pembayaran *paper based, card based, dan electronic*

based semakin marak dan menjadi pilihan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi. Pemerintah memberikan respon positif dengan menggagas Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) tahun 2014 dengan Bank Indonesia. Kementerian keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) berupaya mengimplementasikan salah satu Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan

Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, yakni pengelolaan likuiditas keuangan negara dengan instrumen keuangan modern, serta untuk meminimalisasi uang tunai yang beredar, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selanjutnya di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 dijelaskan tentang penggunaan kartu kredit pemerintah pada uang persediaan satuan kerja dalam rangka belanja negara. Uang Persediaan merupakan uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kartu kredit pemerintah meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan serta mampu meminimalisir moral hazard pengelola keuangan negara.

Adapun rujukan teori yang diambil peneliti adalah dari jurnal dan buku yang relevan dengan judul penelitian antara lain

1. Kevin Dowd (2009) dalam *Cato Journal Volume 29 No. 1 (2009)* dengan judul *Moral Hazard and The Financial Crisis* menyatakan bahwa moral hazard merupakan pangkal terjadinya krisis keuangan tidak hanya internal dalam entitas, namun merambah sampai dengan krisis keuangan negara bahkan dunia.
2. Rahmat Setiawan (2014) dalam Jurnal *The 7th NCFB and Doctoral Colloquium 2014, Towards a New Indonesia Business Architecture*, sub tema : *Business Transformation Toward AEC 2015*, dengan judul *Masalah Agency Free Cash Flow dan Perilaku Moral Hazard* (Suatu tinjauan Teoris dan Empiris). Penulis menjelaskan Masalah agensi *free cash flow* merupakan masalah konflik kepentingan antara pihak *insider* dengan pihak *outsider* perusahaan berkaitan dengan penggunaan *free cash flow* perusahaan. Masalah agensi *free cash*

flow menyebabkan pihak *insider* melakukan perilaku *moral hazard*, yakni perilaku *overinvestment*.

3. Taswan Ibrahim dan Ragimun (2014) dengan jurnal yang berjudul "*Moral Hazard dan Pencegahannya pada Industri Perbankan di Indonesia*" mengkaji perilaku *moral hazard* yang terjadi di salah satu bank yang ada di Indonesia.

4. Margaretha Kaligis, Ventje Ilat, Winston Pontoh (2015) dengan judul penelitian dengan judul Penerapan Sistem Pengendalian Intern Kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung bertujuan untuk mengetahui efektifitas penerapan sistem pengendalian intern kas masuk dan kas keluar Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung.

5. Shiva, Reddy K, dan Durai, Raj K. (2017) dalam Jurnal yang diterbitkan oleh *Academy of Accounting and Financial Studies Journal Volume 21, Number 3, 2017*, dengan judul "*Impact of Credits Cards And Debit Cards Currency Demand And Seigniorage: Evidence From India*". Yang menyebutkan dua alasan yang pemerintah menggunakan kartu kredit. Pertama, penggunaan kartu dapat memengaruhi jumlah mata uang yang harus dijaga oleh bank sentral dalam peredaran mata uang. Kedua, Kartu kredit adalah salah satu alat pembayaran dengan kartu, selain kartu debit.

6. Salome Musau, Stephen Muathe & Lucy Mwangi (2018) dengan jurnal yang berjudul "*Financial Inclusion, Bank Competitiveness and Credit Risk of Commercial Banks in Kenya*" yang mengkaji permasalahan *moral hazard* yang terjadi pada salah satu bank yang ada di negara Kenya, bentuk *moral hazard* di bank tersebut yaitu terkait dengan para peminjam dana atau uang di bank tersebut yang selalu melakukan keterlambatan pengembalian dana atau uang kepada bank.

7. Pelealu, A., Nangoi, G. B., & Gerungai, N. Y. T. (2018) dengan jurnal penelitian dengan judul Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi non tunai yang telah diterapkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung memberikan dampak peningkatan akuntabilitas dan transparansi aliran dana sehingga dapat menghindari

penyalahgunaan keuangan pada perangkat daerah meskipun beberapa kendala masih harus diberikan solusi lebih lanjut

8. Suluh Hendrawan, Nur Anisa dan Nasihatun Nafidah (2019) dengan penelitian dengan judul Implementasi Transaksi Non Tunai Sebagai Dasar Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik : Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jombang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi serta tertib administrasi sudah berhasil dicapai dalam implementasi transaksi non-tunai.

Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan studi kasus yaitu implementasi kartu kredit pemerintah dalam belanja negara. Obyek penelitian adalah satuan kerja lingkup KPPN Blitar yang masuk dalam kriteria satuan kerja wajib implementasi kartu kredit pemerintah baik yang telah menggunakan maupun yang belum menggunakan, *Customer Service Officer* (CSO) KPPN Blitar, dan pihak Bank Penerbit kartu kredit pemerintah. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara, dokumen /arsip dan observasi. Data hasil wawancara merupakan data primer dari penelitian ini, sedangkan observasi dan dokumen/arsip merupakan data sekunder/pendukung penelitian. Teknik analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman (1984) yang kemudian dilakukan pengujian keabsahan data dengan menggunakan pengujian kredibilitas melalui metode triangulasi, pengujian transferability, pengujian dependability dan pengujian confirmability.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil penelitian merupakan temuan penelitian yang merupakan hasil wawancara dengan narasumber/informan sebagai berikut :

1. Temuan Penelitian Satuan Kerja wajib Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang belum menggunakan KKP disebabkan oleh hal sebagai berikut :

a. Kebijakan Kementerian/Lembaga yaitu kebijakan pengadaan barang operasional dengan mekanisme kontrak dan kebijakan

pembayaran belanja perjalanan dinas dengan uang harian,

- b. Pemotongan pajak
Terdapat kesulitan pembebanan pajak kepada penyedia atau kepada bendahara pengeluaran yang berpengaruh pada nilai transaksi dengan kartu kredit.
- c. Limit Kartu Kredit Pemerintah (KKP)
Besaran limit KKP yang dirasa satuan kerja tidak mencukupi untuk belanja operasional.
- d. Pengalaman kegagalan transaksi
Memiliki pengalaman tidak bisa membayar biaya hotel yang cukup besar saat melakukan checkout, sehingga pegawai harus menggunakan uang pribadi.
- e. Mesin EDC
Tidak tersedianya mesin EDC pada toko langganan.
- f. Pendaftaran penyedia pada *market place*.
Belum adatindak lanjut dari bank penerbit terkait dengan pendaftaran toko langganan pada *market place* bank penerbit KKP.

2. Temuan Penelitian satuan kerja wajib Implementasi KKP yang sudah menggunakan KKP

Fokus Pertama : Efektifitas dan Efisiensi Belanja Negara

a. Temuan penelitian yang berkaitan dengan fokus pertama yaitu :

- 1) Fleksibilitas KKP yang meliputi (a) KKP dapat dilakukan belanja offline maupun online (b) KKP dapat toko mana saja yang memiliki mesin EDC yang sama dengan bank penerbit KKP (c) Pemilihan sistem pembayaran dengan autodebet KKP.
- 2) Tingkat Keamanan KKP yang meliputi (a) keamanan dari resiko kehilangan, pencurian dan perampokan (b) keamanan dari potensi fraud transaksi tunai dan (c) keamanan menggunakan kartu dengan adanya PIN.

Fokus Kedua : Meminimalisir Moral Hazard Pengelola Keuangan

a. Temuan penelitian yang berkaitan dengan fokus kedua yaitu

- 1) Pembagian kewenangan meliputi (a) Pemegang KKP yang melaksanakan belanja negara (b) Penguji tagihan KKP yang melihat kesesuaian transaksi (c) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

- sebagai kepala satuan kerja pemilik kebijakan
- 2) Resiko uang persediaan dalam bentuk tunai meliputi (a) Potensi Fraud transaksi tunai (b) Pengeluaran kas tidak didukung bukti administrasi yang jelas.
 - 3) Akuntabilitas tagihan negara meliputi (a) Transaksi yang jelas (b) Tidak dapat dimanipulasi (c) Sebagai pengawasan belanja
3. Temuan Penelitian dari Customer Service Officer (CSO) KPPN Blitar

Fokus Pertama : Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan

a. Hasil temuan penelitian terkait dengan fokus pertama yaitu :

- 1) Mekanisme Pembayaran APBN meliputi (a) pembayaran langsung (LS), (b) pembayaran dengan uang persediaan (UP)
- 2) *Idle cash* dan *cost of fund* dana pemerintah meliputi (a) dapat dikurangi (b) dimanfaatkan untuk investasi pemerintah (c) digunakan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat.

4. Temuan Penelitian dari Bank Penerbit KKP

Berdasarkan paparan data dari bank penerbit KKP diperoleh temuan penelitian sebagai berikut :

- a. Penyediaan mesin EDC yang belum optimal APBN sebagai berikut 1) Pembatasan pengadaan mesin EDC oleh kantor pusat bank, 2) Kurangnya respon penyedia, 3) *Habit* masyarakat Blitar.
- b. *Market share* dan laba perusahaan adalah sebagai berikut 1) menambah *market share* 2) menaikkan laba perusahaan

Fokus Pertama : Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan

Tabel 1
Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan

No	Uraian	Satker pengguna KKP	CSO KPPN
1	Fleksibilitas kartu kredit pemerintah	a. Belanja offline dan online b. Toko yang memiliki mesin EDC c. Sistem Autodebet	
2	Tingkat Keamanan	a. Resiko kehilangan, pencurian dan perampokan b. Mencegah fraud transaksi tunai c. Kartu dengan PIN	
3	Mekanisme pembayaran APBN		a. Pembayaran langsung (LS) b. Pembayaran Uang Persediaan (UP)
4	Idle cash dan cost of fund dana pemerintah		a. Dapat dikurangi b. Dimanfaatkan untuk investasi pemerintah c. Digunakan untuk kebutuhan yang lebih bermanfaat

Dari hasil temuan pada tabel 1, peneliti mengambil kesimpulan bahwa implementasi kartu kredit pemerintah mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Fleksibilitas kartu kredit pemerintah.

Adanya Fleksibilitas penggunaan KKP yang sesuai dengan PMK Nomor 196 tahun 2018 pasal 4 ayat 5a disebutkan bahwa fleksibilitas yaitu kemudahan penggunaan (*flexibility*) kartu dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas dan transaksi yang dilakukan di seluruh merchant yang menerima pembayaran melalui mesin EDC/media daring. Fleksibilitas lainnya adalah pilihan metode bayar yang dapat digunakan dengan KKP sebagaimana yang diterapkan dalam pembayaran belanja langganan daya dan jasa yaitu listrik dan

telepon dengan menggunakan autodebet KKP untuk menghindari keterlambatan pembayaran. sistem ini telah mampu menerapkan prinsip efektivitas sebagai perbandingan masukan-keluaran dalam berbagai kegiatan sampai dengan pencapaian tujuan yang di tetapkan baik di tinjau dari kuantitas (volume) hasil kerja, kualitas hasil kerja maupun batas waktu yang ditargetkan (Hans Kartikahadi, 2016)

2. Tingkat Keamanan

Pembayaran transaksi tunai dalam pengelolaan keuangan negara memiliki banyak inefisiensi, seperti apabila melakukan transaksi dalam jumlah besar beresiko kehilangan akibat dari pencurian atau perampokan, Transaksi tunai dianggap menjadi salah satu sarana potensi *fraud* menurut Robert Cockreall (Auditor Ernst & Young) dalam makalahnya *Forensic Accounting Fundamental : Intoduction to the Investigation*. Sehingga solusi dengan transaksi non-tunai merupakan salah satu langkah yang paling efektif untuk mengurangi adanya kecurangan (Sobko, 2014). Dalam penggunaan KKP, telah dilengkapi dengan *Personal Identification Number* (PIN) dalam melakukan transaksi keuangan untuk menghindari penyalahgunaan penggunaan kartu oleh yang tidak berhak. Untuk itu KKP merupakan salah satu kebijakan yang mendukung pelaksanaan efisiensi transaksi tunai yang dilakukan khususnya dalam pengelolaan keuangan negara. Tanpa melibatkan uang tunai, pencapaian tujuan belanja negara dalam memenuhi kebutuhan satuan kerja untuk menjalankan tugas dan fungsinya telah dapat terpenuhi.

3. Mekanisme APBN

Prinsip uang persediaan satuan kerja adalah uang tunai yang berfungsi sebagai kas kecil (*petty cash*). Dana kas kecil merupakan uang kas dimana yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis apabila dibayar dengan cek (Baridwan, 2009). Mekanisme pengeluaran APBN dilaksanakan melalui dua mekanisme yaitu langsung (LS) dan uang persediaan (UP). Kedua mekanisme tersebut digunakan sesuai dengan sifat dari sebuah transaksi, mekanisme UP digunakan untuk pengeluaran dalam rangka belanja kebutuhan operasional dengan kategori belanja barang (akun 52)

yang biasanya dilakukan berulang dengan prinsip dasar “tunai”. Sedangkan mekanisme LS digunakan untuk pembayaran belanja pegawai (akun 51) meliputi gaji, honorarium, lembur dan belanja modal (akun 53) dengan nilai transaksi yang besar dan dilakukan dengan mekanisme kontrak, dan sifat pengadaannya yang tidak berulang atau tidak rutin. Dan pengaturan belanja lainnya sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 190 Tahun 2012.

4. *Idle cash* dan *cost of fund* dana pemerintah.

Dalam lingkup yang lebih luas, KKP menjadi salah satu *instrument* pemerintah dalam pengelolaan keuangan khususnya mengurangi *idle cash* pada satuan kerja dan mengurangi *cost of fund* dana pemerintah. Implementasi KKP telah mampu mengurangi jumlah uang persediaan pada satuan kerja seperti satuan kerja lingkup KPPN Blitar dengan 10 satuan kerja yang telah melaksanakan implementasi KKP dapat mengurangi kas tunai bendahara sampai dengan 300 juta. Hal ini menunjukkan efektifitas dan efisiensinya KKP mengurangi *idle cash* pada bendahara pengeluaran.

Dalam tulisan Todung Luther, Kepala KPPN Palu dalam kemenkeu.go.id, diakses tanggal 12 Agustus 2020 terkait dengan manajemen kas pemerintah disebutkan bahwa pemerintah dapat mengkonsolidasikan uang operasional yang selama ini menganggur (*idle cash*) di rekening bendahara pengeluaran satuan kerja ke rekening kas umum negara. Setiap tahun terjadi pengendapan uang negara pada bendahara pengeluaran satuan kerja yang jumlahnya cukup besar. Prinsip uang persediaan dalam ketentuan tidak sepenuhnya digunakan secara optimal oleh satuan kerja. Uang kas yang ada di bendahara disebut menganggur dikarenakan uang tersebut tidak memberikan pengembalian (*return*) atau memberikan tingkat pengembalian, namun dalam jumlah yang sangat kecil melalui bunga bank. Dengan uang operasional satuan kerja yang terkonsolidasi di rekening kas umum negara, Pemerintah dapat mengoptimalkan tingkat pengembalian atas saldo kas negara tersebut. Optimalisasi pengelolaan kas dilaksanakan berdasarkan posisi saldo kas, dimana pada saat saldo kas di rekening kas negara berlebih,

Pemerintah dapat melakukan investasi, seperti melalui penempatan uang negara baik di Bank Sentral maupun di Bank Umum, pembelian surat berharga negara (SBN) pada pasar sekunder maupun *reverse repurchase agreement (reverse repo)*. Sedangkan pada saat posisi saldo kas kekurangan, Pemerintah dapat melakukan penarikan kembali dari rekening penempatan, menjual surat berharga negara (SBN), melakukan *repurchase agreement (repo)* atau menerbitkan surat perbendaharaan negara (SPN) di pasar perdana. Melalui kegiatan optimalisasi kas tersebut, saldo kas Pemerintah yang terkonsolidasi memberikan manfaat/*return* lebih besar jika dibandingkan saldo kas tersebut menganggur di rekening bendahara satuan kerja.

Dari penjelasan sebagaimana diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemanfaatan kartu kredit di satuan kerja pemerintah tidak hanya sekedar membawa pemanfaatan teknologi perbankan ke sektor publik dengan berbagai keunggulan namun lebih dari itu, karena penggunaan kartu kredit tersebut merupakan bagian dari strategi pengelolaan kas pemerintah dalam mengoptimalkan saldo kas yang selama ini menganggur di rekening bendahara satuan kerja.

Fokus Kedua : Meminimalisir Moral Hazard Pengelola Keuangan Negara

Tabel 2
Meminimalisir Moral Hazard
Pengelola Keuangan Negara

No	Uraian	Satker pengguna KKP	CSO KPPN
1	Pembagian wewenang	a. Pemegang KKP b. Penguji tagihan KKP c. KPA pemilik kebijakan	
2	Resiko uang persediaan dalam bentuk tunai	a. Potensi fraud transaksi tunai b. Pengeluaran kas tidak didukung bukti administrasi yang lengkap	
3	Akuntabilitas tagihan negara		a. Transaksi jelas b. Tidak dapat

No	Uraian	Satker pengguna KKP	CSO KPPN
			dimanipulasi c. Sebagai pengawasan belanja

Dari hasil temuan pada tabel 2, peneliti mengambil kesimpulan bahwa implementasi kartu kredit pemerintah mampu meminimalisir *moral hazard* pengelola keuangan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pembagian wewenang

Implementasi KKP dalam belanja negara telah cukup mampu untuk meminimalisir potensi moral hazard pengelola keuangan yang tidak terlepas dari peran kepala satuan kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam melaksanakan pengelolaan keuangan yang menjadi tanggungjawabnya. Pembagian peran dalam rangka pengendalian internal penggunaan dan pertanggungjawaban KKP tersebut sejalan dengan penelitian Margaretha Kaligis dkk (2015) yang menyatakan bahwa pengelolaan pengendalian internal dapat berjalan dengan efektif dan memadai karena ada pemisahan tugas yang cukup serta sistem dan prosedur yang dilaksanakan secara baik dalam pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang baik akan mempersempit potensi moral hazard yang mungkin dilakukan oleh pengelola keuangan negara yang menguntungkan baik secara pribadi maupun kelompok karena dampak dari perilaku tersebut akan menyebabkan kerugian negara bahkan sampai dengan krisis keuangan negara, mengingat pengelola keuangan satuan kerja memiliki dana kelolaan yang cukup besar. Hal ini sesuai dengan jurnal Kevin Dowd (2009) yang menyebutkan bahwa bahwa moral hazard merupakan pangkal terjadinya krisis keuangan tidak hanya internal dalam entitas, namun merambah sampai dengan krisis keuangan negara bahkan dunia.

Resiko yang akan dialami bendahara dengan jaminan seluruh harta kekayaan apabila melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan menjadi hukuman (penalty) sesuai dengan teori Dunham L. Cobb (1970) dari University of Yale yang menyebutkan hukuman (penalty) adalah konsekuensi yang diberikan kepada seseorang

apabila tertangkap bersalah ketika melakukan hal yang tidak dibenarkan. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa semakin berat hukuman yang diberikan atas pelaku moral hazard, maka akan semakin mampu menekan perilaku moral hazard dan berlaku sebaliknya.

2. Resiko uang persediaan dalam bentuk tunai

Uang persediaan yang disimpan oleh bendahara pengeluaran dalam jumlah yang besar tentunya akan menimbulkan resiko. Pertama, Semakin besar uang tunai pada bendahara pengeluaran, maka akan semakin besar pula transaksi tunai yang dilakukan, hal ini telah dibahas sebelumnya tentang potensi *moral hazard* pada transaksi tunai. Kedua, perintah dari atasan dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satuan kerja untuk keperluan mendesak yang tidak didukung bukti pengeluaran kas menunjukkan bahwa siklus akuntansi tidak dilaksanakan dengan baik karena bukti pengeluaran kas merupakan dokumen sumber yang penting selain bukti cek dalam pengelolaan keuangan (Mulyadi, 2001). Apapun bentuk dan namanya, penggunaan kas harus didukung dengan bukti pengeluaran kas sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara dan ketentuan pembukuan oleh bendahara pengeluaran. Tidak ada dukungan administrasi secara jelas dari pengeluaran kas dapat menimbulkan resiko penyalahgunaan.

3. Akuntabilitas Tagihan Negara

Akuntabilitas tagihan negara dengan KKP memiliki potensi yang cukup besar dalam menekan *moral hazard* baik transaksi tunai maupun non tunai. Potensi *fraud* transaksi tunai adalah adanya kesepakatan *mark up* harga sampai dengan kuitansi fiktif, sedangkan *fraud* transaksi non tunai adalah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang dapat diminimalisir karena semua transaksi akan terekam dengan jelas baik yang disampaikan ke PPK melalui notifikasi sistem KKP maupun daftar tagihan yang diterbitkan setiap periode jatuh tempo yang dikirimkan oleh bank penerbit KKP. Tujuan lain dari penggunaan kartu kredit pemerintah adalah upaya yang dilakukan agar satuan kerja sebagai pemegang

Kuasa Anggaran Negara lebih transparan dan jauh dari upaya penyalahgunaan dana (Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, CNN Indonesia diakses tanggal 15 Agustus 2020). Transparansi pengelolaan keuangan negara telah menjadi kebutuhan seluruh warga negara Indonesia yang mendapat perhatian Pemerintah Indonesia. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara Indonesia secara formal telah menetapkan komitmen untuk mengelola keuangan negara dengan mengadopsi pilar-pilar utama tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kepatuhan.

Kesimpulan

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dirumuskan terkait dengan implementasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam belanja negara, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi belanja negara dengan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) memberikan keamanan, fleksibilitas, transparansi dan akuntabilitas belanja negara. KKP mampu memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas belanja negara, dimana ada rekam jejak digital transaksi dalam tagihan KKP meliputi jenis, tempat, penggunaan dan besaran transaksi yang telah dilakukan. Dari seluruh kelebihan dalam penggunaan KKP tersebut dapat disimpulkan bahwa KKP memiliki efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan.

Selanjutnya Pemisahan tugas dan wewenang pelaksanaan KKP oleh pejabat pengelola perbendaharaan telah diantisipasi baik oleh satuan kerja. sehingga potensi *moral hazard* dapat ditekan. Disamping itu akuntabilitas tagihan negara juga menjadi faktor penting dalam rangka meminimalisir *moral hazard* pengelola keuangan, karena semua transaksi tercatat dengan tertib sehingga dapat digunakan sebagai pengawasan belanja yang tidak dapat dimanipulasi karena melibatkan sistem perbankan.

Hasil temuan penelitian lainnya adalah belum optimalnya pelaksanaan implementasi KKP oleh satuan kerja dengan kategori wajib melaksanakan KKP dengan masih ada 20 satuan kerja dari 30 satuan kerja wajib

implementasi KKP yang belum melaksanakannya.

Referensi

- Dowd, Kevin. 2009. Moral Hazard and Financial chrisis, *Cato Journal*.vol 29 No.1 *Encyclopedia of Business* 2nd Edition. Agency Theory.
- Margaretha Kaligis, Ventje Ilat, Winston Pontoh (2015). Penerapan Sistem Pengendalian Intern Kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Universitas Sam Ratulangi* Volume 15 No. 3 tahun 2015 278-287
- Moleong, J. Lexi. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Meilinda Nur Rasyida Fatmawati, Indah Yuliana. 2019. Pengaruh Transaksi Non Tunai Terhadap Jumlah Uang beredar di Indonesia tahun 2015 – 2018. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi* 2019. ISSN (Online): 2580-7668. ISSN (Print): 2085-5230 Vol. 11 No. 2 (<https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/akuntansi/article/view/1608>)
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang perubahan PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-17/PB/2017 tentang Pelaksanaan Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan.
- Pelealu, A., Nangoi, G. B., & Gerungai, N. Y. T. (2018). Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 220-229. Universitas Sam Ratulangi Manado
- Rahmat Setiawan. 2014. Masalah Agency Free Cash Flow dan Perilaku Moral Hazard (Suatu tinjauan Teoris dan Empiris). *Jurnal The 7th NCFB and Doctoral Colloquium 2014, Towards a New Indonesia Business Architecture*, sub tema : Business Transformation Toward AEC 2015. ISSN No: 1978-6522 (<https://pdfs.semanticscholar.org>).
- Salome Musau, Stephen Muathe & Lucy Mwangi (2018). Financial Inclusion, Bank Competitiveness and Credit Risk of Commercial Banks in Kenya.
- Shiva, Reddy K, dan Durai, Raj K. (2017). “Impact of Credits Cards And Debit Cards Currency Demand And Seugniorage: Evidence From India”. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal* Volume 21, Number 3, 2017.
- Suluh Hendrawan, Nur Anisah, Lina Nasihatun Nafidah. *Jurnal Imu Akuntansi* Volume 12 (2), 2019 P-ISSN: 1979-858X, E-ISSN: 2461-1190, page 227-236 Implementasi Transaksi Non-Tunai Sebagai Dasar Tata Kelola Pemerintah Yang Baik: Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jombang.